

MAKALAH

Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik

Dosen Pengampu

1. Dr. Pujianti, M.Pd.
2. Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.
3. Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh:

Kelompok 9

1. Rizka Mufidah 2313031002
2. Sela Ayu Irawati 2313031015

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

PRAKATA

Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan makalah ini. Atas berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Konsep Dasar Penelitian Ekonomi” ini dengan tepat waktu.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Akuntansi Sektor Publik yang diampu oleh Ibu Pujianti, S.Pd., M.Pd., Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA dan Ibu Fiariaka Dwi Utari, S.Pd., M.Pd. Selain itu penulis juga berharap makalah ini dapat menambah wawasan terkait bidang yang ada dalam makalah ini.

Kami berharap maklah ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya para pembaca yang sednag dalam pemebelajaranya dan se bagai sarana penunjang proses belajar mengajar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, Kami menyadari makalah ini tidak lepas dari kekurangan baik dalam pengetikan maupaun dalam pembahasanya. Oleh karena itu, kami menyampaikan permohonan maaf serta terbuka keritik dan saran demi perbaikan dimasa mendatang.

Bandar Lampung 23, September 2025

Kelompok 9

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Penulisan.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Definisi Akuntansi Keuangan Sektor Publik	3
2.2 Teknik-teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik	4
2.3 Fokus Pengukuran.....	6
2.4 Sistem Pencatan.....	7
BAB III PENUTUP.....	9
3.1 Kesimpulan.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10
STUDI KASUS.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era transparansi dan akuntabilitas publik yang semakin meningkat, pengelolaan keuangan negara dan daerah menuntut adanya sistem akuntansi yang tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah sebagai pengelola dana publik memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dilaporkan dengan jelas dan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, peran akuntansi keuangan sektor publik menjadi sangat penting dalam menyediakan informasi keuangan yang relevan bagi pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Akuntansi keuangan sektor publik berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya publik. Melalui laporan keuangan yang disusun secara sistematis dan sesuai standar, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik. Informasi tersebut juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan fiskal, perencanaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Teknik akuntansi keuangan sektor publik sendiri merupakan seperangkat metode dan prosedur yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi keuangan yang terjadi pada lembaga pemerintahan atau organisasi publik. Berbeda dengan akuntansi sektor swasta yang berorientasi pada laba, akuntansi sektor publik berorientasi pada akuntabilitas dan pelayanan publik. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa dana masyarakat dikelola secara efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan penerapan teknik akuntansi keuangan sektor publik yang baik, laporan keuangan pemerintah akan mampu mencerminkan kondisi keuangan secara objektif dan akurat. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi yang diamanatkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan yang konsisten terhadap prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan integritas lembaga publik di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan akuntansi keuangan sektor publik?
2. Apa saja teknik- teknik akuntansi yang digunakan dalam sektor publik?
3. Bagaimana penerapan fokus pengukuran dalam pengelolaan keuangan sektor publik?
4. Apa saja komponen utama dalam sistem pencatatan keuangan sektor publik?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengertian akuntansi keuangan sektor publik
2. Untuk mengetahui teknik -teknik akuntansi yang digunakan dalam sektor publik
3. Untuk mengetahui penerapan pengukuran dalam pengelolaan keuangan sektor publik
4. Untuk Mengetahui Sistem Pencatatn Keuangan Sektor Publik

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Definisi Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Berdasarkan teori entitas, perusahaan atau suatu organisasi merupakan entitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya. Akuntansi hadir untuk menjamin pertanggungjawaban dan akuntabilitas suatu entitas atas pengelolaannya terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Olehkarena itu, kehadiran akuntansi pada organisasi sektor publik yaitu sebagai alat pengendalian transaksi keuangan dan juga mendukung pencapaian tujuan organisasi sektor publik.

Secara umum, teknik-teknik akuntansi meliputi tiga hal yaitu pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Pengakuan meliputi proses pengidentifikasian dengan memastikan bahwa suatu transaksi atau kejadian apakah merupakan kejadian ekonomi. Pengakuan juga meliputi pengidentifikasian apakah suatu transaksi kejadian ekonomi sudah bisa diakui atau belum berdasarkan kriteria tertentu yang berlandaskan pada asumsi basis akuntansi yang digunakan. Selanjutnya, pengukuran yaitu apakah kejadian ekonomi tersebut dapat diukur dengan ukuran moneter atau nilai uang dan jika tidak maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Pengungkapan meliputi pencatatan jurnal hingga penyusunan laporan keuangan. Akuntansi sektor publik merupakan salah satu jenis akuntansi. Oleh karena itu, teknik-teknik akuntansi pada organisasi sektor publik secara umum sama dengan teknik-teknik akuntansi keuangan pada sektor swasta yang mana terdiri dari pengakuan, pengukuran dan pencatatan atau pengungkapan. Meskipun begitu, pemahaman terhadap teknik- teknik akuntansi sektor publik tetap menjadi perlu mengingat karakteristik organisasi sektor publik yang berbeda dengan organisasi sektor swasta. Akuntansi keuangan sektor publik meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas sektor publik yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan pada organisasi sektor publik

2.2 Teknik-teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor publik, yaitu:

1. Akuntansi Anggaran
2. Akuntansi Komitmen

3. Akuntansi Dana

4. Akuntansi Kas

5. Akuntansi Akrua

Pada dasarnya kelima teknik akuntansi tersebut tidak bersifat mutually exclusive. Artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak berarti menolak penggunaan teknik yang lain. Dengan demikian, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda, bahkan dapat menggunakan kelima teknik tersebut secara bersama-sama.

Akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi komitmen berbeda satu dengan lainnya karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya. Dalam hal pengakuan pendapatan, pada dasarnya terdapat dua langkah yang mempengaruhi pencatatan, yaitu pada saat barang dikirim dan faktur dikeluarkan, dan pada saat barang dikirim dan faktur dibayar.

1. Akuntansi Anggaran

Teknik akuntansi anggaran adalah teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan (double entry). Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dengan anggarannya. Jumlah belanja yang dianggarkan dikreditkan terhadap akun yang sesuai kemudian apabila akun tersebut direalisasikan, maka akun tersebut di debit kembali. Saldo yang ada dengan demikian menunjukkan jumlah anggaran yang belum dibelanjakan. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematis dan kontinyu jumlah anggaran dengan realisasi anggaran. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas. Alasan yang melatarbelakangi teknik akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terdapat variansi (selisih). Namun, akuntansi anggaran lebih menekankan pada bentuk akun-akun keuangan bukan isi (content) dari akun itu sendiri. Salah satu kelemahan teknik akuntansi anggaran adalah bahwa teknik ini sangat kompleks. Akan lebih mudah dan lebih komprehensif apabila akun-akun yang ada menunjukkan pendapatan dan biaya aktual, dan anggaran menunjukkan pendapatan dan biaya dianggarkan.

2. Akuntansi Komitmen

Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan pencatatannya pada saat order dikeluarkan. Sistem akuntansi akrual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan ketika faktur dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Akuntansi komitmen terkadang hanya menjadi subsistem dari sistem akuntansi utama yang dipakai organisasi. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi tersebut. Hal ini berarti bahwa transaksi tidak diakui ketika kas telah dibayarkan atau diterima, tidak juga ketika faktur diterima atau dikeluarkan, akan tetapi pada waktu yang lebih awal, yaitu ketika order dikeluarkan atau diterima. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran, ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Dengan menerima akun atas faktur yang diterima atau dibayarkan, ia dapat dengan mudah menghabiskan anggaran (*overcommit*). Tentu saja manajer yang teliti akan tahu bahwa akun-akun tidak memasukan order yang dikeluarkan yang mana faktur belum diterima dan oleh karena itu ia membuat catatan sendiri agar ia tidak melakukan pemborosan anggaran (*over commit the budget*). Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan. Meskipun akuntansi komitmen dapat memperbaiki pengendalian terhadap anggaran, namun terdapat masalah dalam pengadopsian sistem tersebut ke dalam akun-akun keuangan. Akun yang dicatat hanya didukung oleh order yang dikeluarkan. Pada umumnya tidak ada kewajiban hukum (*legal liability*) untuk patuh terhadap order yang terjadi dan order tersebut dapat dengan mudah dibatalkan. Hal ini menjadikan sulit untuk mengakui biaya-biaya untuk periode akuntansi yang bersangkutan yang mana hanya mendasarkan pada order yang dikeluarkan.

3. Akuntansi Dana (Fund Accounting)

Pada organisasi sektor publik masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi sektor publik. Dalam tahap awal perkembangan akuntansi dana, pengertian

“dana (fund)” dimaknai sebagai dana kas (cash funds). Tiap dana tersebut harus ditempatkan pada laci lain dan terpisah beberapa tagihan harus diambilkan dari satu laci dan tagihan lain di laci yang lainnya. Namun saat ini “dana” dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, termasuk sumber daya non kas dan utang diperhitungkan di dalamnya.

Persamaan Akuntansi Dana

Dalam akuntansi dana, dikenal persamaan akuntansi berikut:

$$\textbf{AKTIVA} = \textbf{KEWAJIBAN} + \textbf{EKUITAS DANA}$$

Persamaan tersebut berbeda dengan persamaan akuntansi yang kita kenal pada akuntansi keuangan yang digunakan dalam perusahaan komersial, yaitu:

$$\textbf{AKTIVA} = \textbf{KEWAJIBAN} + \textbf{EKUITAS}$$

Di sini, terdapat perbedaan yang mendasar antara ekuitas dana dan ekuitas. Selisih antara aktiva dan utang di perusahaan adalah ekuitas yang menunjukkan adanya kepemilikan pada perusahaan tersebut oleh pemegang sahamnya. Sementara itu, di organisasi sektor publik, ekuitas dana tidak menunjukkan adanya kepemilikan siapa pun karena memang tidak ada kepemilikan individu dalam suatu organisasi sektor publik.

Teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan oleh Vatter (1947) untuk tujuan organisasi bisnis. Pada waktu itu ia melihat bahwa di antara perusahaan pribadi dengan perusahaan badan memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah, pertama: perusahaan perorangan (milik pribadi) kurang menguntungkan dibandingkan perusahaan yang dimiliki publik (perseroan terbatas). kedua, adanya kesalahan dalam memahami makna entitas. Berdasarkan kedua hal tersebut Vatter berpendapat bahwa reporting unit harus diperlakukan sebagai dana dan organisasi harus dilihat sebagai suatu rangkaian dana, maka laporan keuangan organisasi tersebut merupakan penggabungan (konsolidasi) dari laporan keuangan dana yang menjadi bagian organisasi.

Sistem akuntansi pemerintah yang menggunakan konsep dana, memperlakukan suatu unit kerja sebagai entitas akuntansi dan entitas anggaran yang berdiri sendiri. Penggunaan akuntansi dana merupakan salah satu perbedaan antara akuntansi pemerintah dengan akuntansi bisnis.

Terdapat dua jenis dana yang dipergunakan pada organisasi sektor publik yaitu:

- a. Dana yang dapat dibelanjakan (*expendable fund*) digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintahan (*governmental fund*).
- b. Dana yang tidak dapat dibelanjakan (*nonexpendable fund*) untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis.

4. Akuntansi Kas

Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Kelebihan *cash basis* adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, riil dan obyektif. Namun demikian GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan menggunakan kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan *cash basis*, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program atau aktivitas, tidak dapat diukur dengan dengan baik. Sebagai contoh, penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai pendapatan (*revenue*) bukan sebagai utang. Untuk mengoreksi hal tersebut, kebanyakan sistem akuntansi kas tidak hanya mengakui kas saja, akan tetapi juga aktiva dan utang yang timbul sebelum terjadi transaksi kas. Namun demikian, koreksi semacam ini tidak dapat mengubah kenyataan bahwa pada setiap waktu, obligasi yang beredar dalam bentuk kontrak atau order pembelian yang dikeluarkan tidak tampak dalam catatan akuntansi. Konsekuensinya adalah saldo yang tercatat akan dicatat lebih (*overstated*). Hal tersebut dapat menyebabkan pemborosan anggaran.

5. Akuntansi Akrua

Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Basis akrual diterapkan agak berbeda antara *proprietary funds (full accrual)* dengan *governmental fund (modified accrual)* karena biaya (*expense*) diukur dalam *proprietary fund* sedangkan *expenditure* difokuskan pada *general fund*. *Expense* adalah jumlah sumber daya yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Karena *governmental fund* tidak memiliki

catatan modal dan utang (dicatat/dikategorikan dalam aktiva tetap dan utang jangka panjang) expenditure yang diukur bukan expense. Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of services dan charging for service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang digunakan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian accrual basis dalam sektor swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan. Akuntansi berbasis akrual membedakan antara pemerintah kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayarkan kas. Oleh karena itu, dengan sistem akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh (earned) atau terjadi (incurred), tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan.

2.3 Fokus Pengukuran

Akuntansi keuangan sektor publik adalah salah satu jenis akuntansi maka dalam akuntansi keuangan sektor publik juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi pada organisasi sektor publik. Proses pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi agar dapat membedakan transaksi yang bersifat ekonomi dan yang tidak. Transaksi yang bersifat ekonomi adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan . Oleh karena itu, proses pengidentifikasian berkaitan erat dengan proses pengukuran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis atau sebesar nilai wajarnya. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban tersebut atau nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan pemerintah menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu dan kemudian dinyatakan dalam mata uang rupiah Sistem Pencatatan dan Basis Akuntansi.

2.4 Sistem Pencatatan

Akuntansi keuangan sektor publik merupakan salah satu jenis akuntansi yang di dalamnya tentu terdapat juga proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di organisasi sektor publik. Proses selanjutnya setelah pengidentifikasian dan pengukuran adalah pencatatan. Sementara itu, sistem pencatatan di dalam akuntansi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu sistem pencatatan single entry, double entry dan triple entry.

1. Single Entry

Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Pada sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Pencatatan semacam ini disebut pembukuan dan merupakan bagian kecil dari akuntansi. Sistem pencatatan single entry atau tata buku memiliki beberapa kelebihan yaitu sederhana dan mudah dipahami. Akan tetapi, sistem ini memiliki kelemahan antara lain kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan laporan), sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi dan sulit dikontrol. Sebelum era reformasi, landasan hukum bagi pelaksanaan akuntansi pemerintahan adalah Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1974, PP No. 5 dan 6 Tahun 1976 dan Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) Tahun 1981. Pengelolaan keuangan pemerintahan pada era pra reformasi tersebut menggunakan sistem pencatatan single entry. Satu-satunya laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya berupa Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang disajikan berdasarkan sumbangan perhitungan anggaran dari departemen/lembaga yang disusun secara manual dan menggunakan sistem pencatatan single entry. Akibatnya, pemerintah tidak memiliki catatan mengenai aset tetap, piutang, utang dan ekuitas dari suatu entitasnya pada saat itu. Oleh karena itu, pada era tersebut, pemerintah tidak pernah menampilkan neraca sebagai bentuk laporan keuangan yang merupakan gambaran mengenai posisi keuangan pemerintah. Sistem pencatatan single entry disebut juga dengan sistem tata buku tunggal dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan

dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Sistem pencatatan single entry atau tata buku ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun sistem ini memiliki kelemahan, antara lain yaitu kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan pelaporan keuangan), sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, dan sulit di kontrol. Oleh karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan di atas. Sistem ini disebut dengan sistem pencatatan double entry. Sistem pencatatan double entry inilah yang sering disebut dengan akuntansi.

2. Double Entry

Sistem pencatatan double entry atau juga disebut dengan tata buku berpasangan adalah sistem pencatatan di mana transaksi ekonomi di catat dua kali. Oleh karena itu, pada sistem pencatatan double entry terbagi dua sisi yaitu debit di sisi kiri dan kredit di sisi kanan. Setiap pencatatan transaksi harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi sebagai berikut.

$$\text{Aset} = \text{Utang} + \text{Ekita}$$

$$\text{Aset} + \text{Belanja} = \text{Utang} + \text{Ekuitas Dana} + \text{Pendapatan}$$

Pada sistem pencatatan double entry organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, transaksi yang berakibat bertambahnya aset akan dicatat pada sisi debit sedangkan yang berakibat berkurangnya aset dicatat pada sisi kredit. Hal yang sama juga dilakukan dalam mencatat belanja. Sementara untuk utang, ekuitas dana dan pendapatan dicatat di sisi debit jika suatu transaksi mengakitkannya berkurang dan dicatat di sisi kredit jika suatu transaksi mengakitkannya bertambah. Kelemahan yang dimiliki sistem pencatatan single entry menyebabkan pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik beralih ke sistem pencatatan double entry. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini.

Persamaan dasar akuntansi tersebut berbentuk sebagai berikut:

$$\text{Aktiva} + \text{Belanja} = \text{Uang} + \text{Ekuitas} + \text{Pendapatan}$$

3. Triple Entry

Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan pada pemerintahan, pejabat penatausahaan keuangan (PPK) satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) maupun bagian keuangan atau satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut berefek pada sisa anggaran. Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Oleh karena itu, sementara sistem pencatatan double entry dilaksanakan, sub bagian pembukuan (bagian keuangan) pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisi anggaran.

4. Basis Akuntansi

Salah satu proses dalam akuntansi yang penting adalah masalah pengakuan (recognition). Proses ini berkaitan dengan kapan suatu transaksi ekonomi diakui kemudian dicatat. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana yang termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

5. Basis Kas

Basis kas hanya mengakui arus kas masuk dan kas keluar. Basis kas menetapkan pengakuan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas maka transaksi tersebut tidak dicatat. Basis kas digunakan di berbagai organisasi sektor publik. Basis kas telah digunakan dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia selama era pra reformasi. Hal ini dikarenakan pada era tersebut pemerintah hanya fokus pada perhitungan anggaran negara yang mana dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima dan belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan.

Keunggulan basis kas adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, riil dan objektif. Akan tetapi dengan basis kas, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Oleh karena itu, muncul basis kas modifikasian di mana organisasi tidak hanya mengakui kas saja, akan tetapi juga aset dan utang yang timbul.

6. Basis Kas Modifikasian

Menurut butir (12) dan (13) Lampiran XXIX (tentang Kebijakan Akuntansi) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa basis kas modifikasian (modified cash basis) adalah kombinasi basis kas dengan basis akrual. Pada saat itu, transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dicatat pada saat uang diterima atau dibayar sedangkan pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.

7. Basis Kas Menuju Akrual

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis kas menuju akrual adalah ketika pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang dan ekuitas dana dicatat dengan basis akrual. Oleh karena itu, pada PP No. 24 Tahun 2005, laporan keuangan pemerintah hanya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan. Sedangkan basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

8. Teknik Akuntansi Sektor Publik

Teknik-teknik akuntansi sektor publik merupakan teknik-teknik akuntansi keuangan yang diadopsi oleh organisasi sektor publik. Teknik akuntansi sektor publik meliputi akuntansi dana, akuntansi anggaran dan akuntansi komitmen. Pada dasarnya, teknik-teknik akuntansi tersebut tidak bersifat mutually exclusive yaitu penggunaan salah satu teknik akuntansi tidak menolak penggunaan teknik lainnya. Oleh karena itu, suatu organisasi sektor publik dapat menggunakan

teknik akuntansi yang berbedabeda dan bahkan dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda secara bersamasama.

9. Akuntansi Dana

Pada organisasi sektor publik masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dan alokasi dana. Pada awalnya, dana dimaknai sebagai dana kas. Namun saat ini, dana dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, termasuk sumber daya nonkas dan utang diperhitungkan di dalamnya. Akuntansi dana merupakan sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari basis kas dan prosedur pengendalian anggaran

10. Akuntansi Komitmen

Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan basis kas dan basis akrual. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran karena manajemen perlu mengetahui berapa besar anggaran yang dilaksanakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Akuntansi komitmen terkadang hanya menjadi subsistem dari sistem akuntansi utama yang dipakai organisasi. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi tersebut.

BAB III

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan teori entitas, perusahaan atau suatu organisasi merupakan entitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya. Akuntansi hadir untuk menjamin pertanggungjawaban dan akuntabilitas suatu entitas atas pengelolaannya terhadap pihakpihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, kehadiran akuntansi pada organisasi sektor publik yaitu sebagai alat pengendalian transaksi keuangan dan juga mendukung pencapaian tujuan organisasi sektor publik. Akuntansi terdiri dari proses pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian ekonomi yang menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, teknik-teknik akuntansi meliputi tiga hal yaitu pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Pengakuan meliputi proses pengidentifikasian dengan memastikan bahwa suatu transaksi atau kejadian apakah merupakan kejadian ekonomi. Pengakuan juga meliputi pengidentifikasian apakah suatu transaksi kejadian ekonomi sudah bisa diakui atau belum berdasarkan kriteria tertentu yang berlandaskan pada asumsi basis akuntansi yang digunakan. Selanjutnya, pengukuran yaitu apakah kejadian ekonomi tersebut dapat diukur dengan ukuran moneter atau nilai uang dan jika tidak maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Pengungkapan meliputi pencatatan jurnal hingga penyusunan laporan keuangan.

Terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi di sektor publik yaitu:

1. Akuntansi anggaran atau (budgetary accounting)
2. Akuntansi komitmen (commitment accounting)
3. Akuntansi dana (fund accounting)
4. Akuntansi kas (cash accounting)
5. Akuntansi akrual (accrual accounting)

Pada dasarnya kalimat teknik akuntansi tersebut tidak bersifat mutually eksklusif, artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak menolak penggunaan teknik akuntansi lainnya. Dengan, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda, Bahkan dapat menggunakan kalimat teknik dalam waktu yang bersamaan. Akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi komitmen berbeda satu dengan lainnya karena adanya perbedaan waktu

pengakuan pendapatan dan biaya. Dalam hal pengakuan pendapatan, pada dasarnya terdapat dua langkah yang mempengaruhi pencatatan, yaitu pada saat barang dikirim dan faktur dikeluarkan, dan pada saat barang dikirim dan faktur dibayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartati, A. dkk. (2022). Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Teori dan Aplikasi. Jawa BaraMedia Sains Indonesia.
- Maulana, T. A. dkk. (2021). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Singaperbangsa Karawang.
- Utama, N. P. S. dkk. (2015). Akuntansi Sektor Publik: Pengukuran Kinerja Publik. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Udayana.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Universitas Gadjah Mada: Andi Yogyakarta.

STUDI KASUS

Pemerintah Daerah Kota Makmur menghadapi masalah dalam pengelolaan anggaran yang mengakibatkan defisit anggaran selama dua tahun berturut-turut. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Makmur adalah, kelebihan belanja operasional, dimana pemerintah daerah mengalokasikan lebih banyak dana untuk belanja pegawai, perjalanan dinas, dan belanja operasional lainnya. Kedua, pendapatan daerah yang tidak tercapai, dan yang terakhir adalah laporan keuangan yang tidak tepat waktu.

1. Bagaimana langkah-langkah untuk memperbaiki pengelolaan anggaran daerah?
2. Apa teknik akuntansi sektor publik yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut?